

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi (Rasul, 2003).

Beberapa hal yang mempengaruhi nilai informasi suatu Laporan Keuangan antara lain adalah sistem akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi

pemerintahan masih belum memadai dan masih minim ini memiliki pengaruh terhadap nilai suatu laporan keuangan pemerintah. Demikian halnya dengan pemanfaatan teknologi informasi.(theresia F. sitanala, 2015:4)

Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengem-bangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah telah diatur dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan Masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai kualitas, dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. (Febry Perdana Kusuma, I Nyoman Mahaendra Yasa, 2016:2)

Informasi akuntansi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Selain itu untuk memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. (kharis, 2010) berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan

sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kapasitas sumber daya manusia yang memadai belum tentu bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal jika tidak didukung dengan teknologi informasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan politik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi yaitu salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual (Indriasasi dan Nahartyo, 2008).

Apabila didalam laporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan karakteristik yang ditetapkan, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, dan nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, kelemahan administrasi, kekurangan penerimaan, ketidakhematan, ketidakefisienan sumber daya. Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Riang Agustin, Dwi Cahyono, 2020:2).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Laporan keuangan dikatakan memiliki nilai reliabilitas apabila mempunyai nilai prediksi atau nilai *feedback* dan disajikan tepat

waktu. Sedangkan kriteria relevan terpenuhi jika laporan keuangan dapat diuji, netral, dan dipercaya. Oleh karena itu dalam membuat laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dibutuhkan kualitas sumber daya manusia dan sistem penendalian intern yang baik. Oleh karena itu, dalam mewujudkan keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat.

Masyarakat sebagai pelaku pengendalian (*social control*) terhadap pemerintahan sangat berperan dalam semua aktivitas pemerintah disegala bidang. Peran serta tersebut harus didasarkan pada kemampuan sumber daya manusia dan pengendalian intern yang digunakan pemerintah agar dapat membuat laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Dapat diartikan bahwa sebenarnya keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan sangat tergantung oleh sumber daya manusia karena faktor itulah yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan sebuah pelaporan keuangan. (Chandra Satria, 2020:4).

Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada, dengan adanya Sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. (Sonia, 2016:3).

Pengendalian merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting: Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*), Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*), Pengendalian korektif (*corrective control*). (Delima, 2015:3)

Selain kualitas aparatur daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah juga turut menentukan kualitas pelaporan keuangan daerah. Karena pada akhirnya, diperlukan suatu proses pengawasan keuangan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. (Loli Efendi, Darwanis, 2017:3).

Pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik. Perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. (Komang Sartika Dewi, Wayan cipta, 2015:2).

Terkait dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah merupakan tujuan penting dalam reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu daerah adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. (Lilis setyowati, Wikan Isthika, 2016:2) .

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Indriasari (2008), yaitu menentukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di kota Palembang dan kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala bagian sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas)

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum (2010), yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di pemerintah daerah SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada memiliki beberapa pegawai akuntansi, dari sisi kualifikasi, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada sudah terspesifikasi dengan jelas.

Perbedaan inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan

keuangan pemerintah daerah. Sehingga, penelitian ini diberi judul“ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada BPKAD Kota Palopo**”. Penelitian ini akan dilakukan pada BPKAD kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan pada BPKADkota palopo?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKADkota palopo?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan pada BPKADkota palopo?
4. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan pada BPKADkota palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menegtahui dan memperoleh bukti secara empiris terkait dengan:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.
3. Pengaruh pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.

4. Pengaruh pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi:

Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajika laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori Nilai Informasi Laporan Keuangan

mendefinisikan informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Selain itu informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang. Gordon B Davis.

Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau intruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks, sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet (semisal dari microsoft excel) seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi, sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga menjadi punya makna dan manfaat.

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut biasa dijadikan informasi. Menurut Mc.Leod dalam Aldisa (2010), suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri:

1. Akurat, Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Tepat Waktu, Informasi itu harus tersedia atau ada saat informasi diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
3. Relevan, Informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. Lengkap Informasi yang diberikan harus secara lengkap.

2.2.Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). (Srimindarti, 2008)

Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya- upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Adapun fungsi akuntabilitas meliputi tiga unsur, yaitu (1) *providing information about decisions*

and actions taken during the course of operating entity, (2) having the internal parties review the information, and (3) taking corrective actions where necessary.

Suatu entitas yang accountable adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas) me-review informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Gumanti,2009)

c. Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.(Yuliani, 2017)

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.3.Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi laporan keuangan pemerintah dikatakan bermanfaat bagi pemakai laporan itu sendiri apabila informasi tersebut mempunyai nilai. Hal itu dapat dilihat saat informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas dari nilai informasi laporan keuangan sangatlah penting salah satunya dapat diukur dengan keterandalan seperti yang diatur pada PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Menurut PP 71 Tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan.

Suatu informasi mungkin saja relevan jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut bisa saja menyesatkan informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang di syarkan. Kualitatif laporan keuangan

adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010) yakni : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan , dan (4) dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Susanto,2010).

(Menurut Wiley (2002) dalam Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang pendidikan

akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. (Coryanata, 2016).

2.5.Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi (Kadir Triwahyuni, 2013:2). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan *flasdisk*, sedangkan teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh .

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.(Rosnidah, 2011).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009) dalam

windyaningrum, 2010). pemanfaatan teknologi juga dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Harifan (2009), pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi yang terdiri dari:

1. Bagian akuntansi / keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas
2. Jaringan internet telah terpasang di unit kerja
3. Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan
4. Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi
5. Pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* sesuai dengan peraturan perundang – undangan
6. Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem yang terintegritasi
7. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur
8. Peralatan yang usang/rusak di data dan diperbaiki tepat pada waktunya.

Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya adalah komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (primayana,dkk, 2014).

2.6.Sistem Pengendalian Intern

Berdasarkan PP No 60/2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang –undangan.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, dengan model skala Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. (Megayanti et al. 2015)

Pemendagri No 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Pada tingkatan organisasi, tujuan pengendalian intern berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap pencapaian tujuan-tujuan operasional dan strategis, serta kepatuhan pada hukum dan regulasi. Pengendalian intern akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data akuntansi yang dapat di percaya. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang

bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian .pelaksanaan pengendalian intern dapat dilakukan sebelum, selma dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (purwono, 2015)

Sistem pengendalian intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Ada beberapa unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian memasukkan bahwa arah pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi dari suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat waktu dan diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai suatu nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya.

2.7. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. (Coryanata,2016).

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). (Rosnidah,2011)

Adapun jenis-jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan intern dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*), atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat Jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah

- c. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan preventif ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara/daerah yang akan membebankan dan merugikan negara/daerah lebih besar. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.
- d. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini umumnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

2.7. Penelitain Terdahulu

No	Peneliti dan tahun penelitian	Judul	Hasil
1.	Fitrini Mansur, Eko Prasetyo, Reka Maiyarni/2017	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena pengawasan keuangan daerah di dinas-

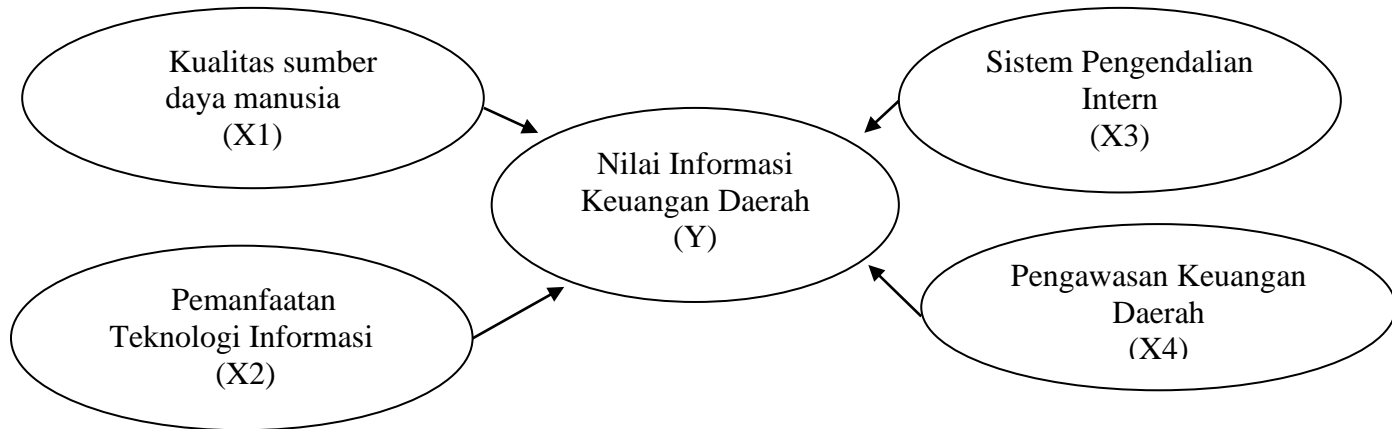
			<p>dinas kabupaten Muaro Jambi telah dilakukan secara efektif, sehingga dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muaro Jamb</p>
2.	<p>Patras Thebora, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu/2017</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Bpk-Ad Kantor Walikota Manado</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologitidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado, sedangkan Pengawasan keuangan daerah dan Sistem pengendalian internberpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di BPK-AD Kantor Walikota Manado</p>
3	<p>Wirmie Eka Putra/2017</p>	<p>Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern, dan kualitas sumber daya manusia secara bersama – sama berpengaruh terhadap</p>

			kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Harahap, Ahmad Jufri/2016	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Audit Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)	Hasil dari penelitian ini menunjukkkn bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan aset daerah, dan audit internal sebagai variabel moderating berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara
5	Ayu Priska Megayanti, Made Pradana Adiputra, Ni Kadek Sinarwati/2015	Faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan berpengaruh

		daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jembrana)	positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, sedangkan informasi asimetri berpengaruh negative signifikan
6	Harlinda/2017	Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sumberdaya manusia, Teknologi informasi, Pengendalian intern akuntansi, Pemahaman akuntansi dan Faktor eksternal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
7	Gusrya Indria Sari,) Fadli	Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh

		keuangan daerah	positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah
8	Widyaningrum (2010)	Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (studi empiris di pemda SUBOSUKAW ONO sraten)	Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.8. Kerangka Konseptual



2.9. Hipotesis

- H1: Diduga kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.
- H2: Diduga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.
- H3: Diduga sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.
- H4: Diduga pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada BPKAD kota palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor BPKAD kota palopo yang beralamat di JL.Jend Sudirman No, 163, binturu. Rentang waktu penelitian direncanakan ± 3 (tiga) bulan. .

3.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh penulis melalui observasi atau pengamatan langsung dari perusahaan, baik itu melalui observasi, kuisioner dan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data prier yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil pengisian kuisioner oleh responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara pada BPKAD kota palopo.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari kuisioner yang dibagikan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada kantor BPKAD kota palopo sebanyak 131 orang.

pengambilan sampel (*sampling method*) terhadap responden dilakukan secara *purposive sampling* karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebelumnya yaitu : (1) Pegawai / Staf BPKAD, (2) Pegawai yang bekerja dibidang keuangan, (3) Bendahara. Oleh karena itu sampel pada penelitian ini adalah para pegawai yang memiliki fungsi akuntansi/tata usaha keuangan BPKAD kota palopo, yang meliputi kepala dan staf bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara yang berjumlah 76 pegawai jumlah kusioner yang disebar sebanyak 76 kuisisioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket (*kuesioner*) adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isi terhadap obyek yang akan diteliti. Teknik angket ini digunakan penulis untuk memperoleh data melalui pertanyaan tertulis yang diberikan kepada kepala dan staf sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan bendahara BPKAD kota palopo. Menggunakan skala *likert* 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif yang ada, yaitu:

1. SS (Sangat Setuju) = 5
 2. S (Setuju) = 4
 3. Netral = 3
 4. TS (Tidak Setuju) = 2
 5. STS (Sangat Tidak Setuju) = 1
2. Pengamatan (*observase*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap pegawai kantor BPKAD kota palopo.
 3. Wawancara (*interview*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab terhadap informasi yang dalam hal ini adalah pegawai kantor BPKAD kota palopo.

3.5 Metode Anaisis Data

3.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antar yang didapat dalam penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. apabila suatu instrumen memiliki rhitung $>$ rtabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid namun, apabila suatu instrumen memiliki rhitung $<$ rtabel maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.(rachmad.2016).

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten. Suatu

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach's Alpha > 0,60 (Rachmad,2016).

3.5.2 Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Mendekati apakah data mendistribusi normal atau tidak. Dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Umar, 2009:72).

2. Uji Multikolinieritas

Merupakan bentuk pengujian asumsi dalam analisis regresi berganda. Multikolinieritas terjadi apabila terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi

3. Uji Heteroskedastisitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

3.5.3. Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian

intern dan pengawasan keuangan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan).

Persamaan regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

A = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien garis regresi

X_1 = Kualitas sumber daya manusia

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Sistem pengendalian intern

X_4 = Pengawasan Keuangan daerah

Y = Nilai informasi pelaporan keuangan (keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan)

E = Standar eror

3.5.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji t (uji parsial) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dan signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel. Untuk menentukan nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu $p\text{-value} < 0,05$, maka H_0 ditolak (Sugiono 2011:80).

2. Uji F (uji simultan) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Untuk menentukan nilai F tabel tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan, yaitu *p-value* > 0,05, maka H_0 ditolak.

3.6. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pernyataan tentang definisi batasan dan pengertian variabel –variabel dalam penelitian secara operasional baik berdasarkan teori yang ada ataupun pengalaman –pengalaman empiris.

1. Kualitas Sumber Daya

(Susanto, 2010). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) sangat dibutuhkan pada pemerintahan daerah dalam hal ini kantor BPKAD kota palopo agar dapat menjadi penyangga utama untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi (Kadir Triwahyuni, 2013:2). Pemanfaatan teknologi dipandang

sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas bagi BPKAD kota palopo.

3. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) yang terjadi pada BPKAD kota palopo.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah dalam hal ini BPKAD kota palopo berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (permendagri No 51 Tahun 2010).

5. Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa keandalan pelaporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, sehingga BPKAD kota palopo harus menyajikan fakta secara jujur dan dapat di verifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum BPKAD Kota Palopo

Pada awal di bentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kota palopo. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembentukan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya peraturan daerah kota palopo nomor 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah berubah menjadi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD).

4.1.2 Tugas dan Fungsi BPKAD Kota palopo

Secara umum kepala badan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan berdasarkan fungsinya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah

- b. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah (BUD) penyelenggaraan kegiatan teknik operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan walikota palopo Nomor 57 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengagguran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga berperan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keungan daerah:

4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

a. Visi

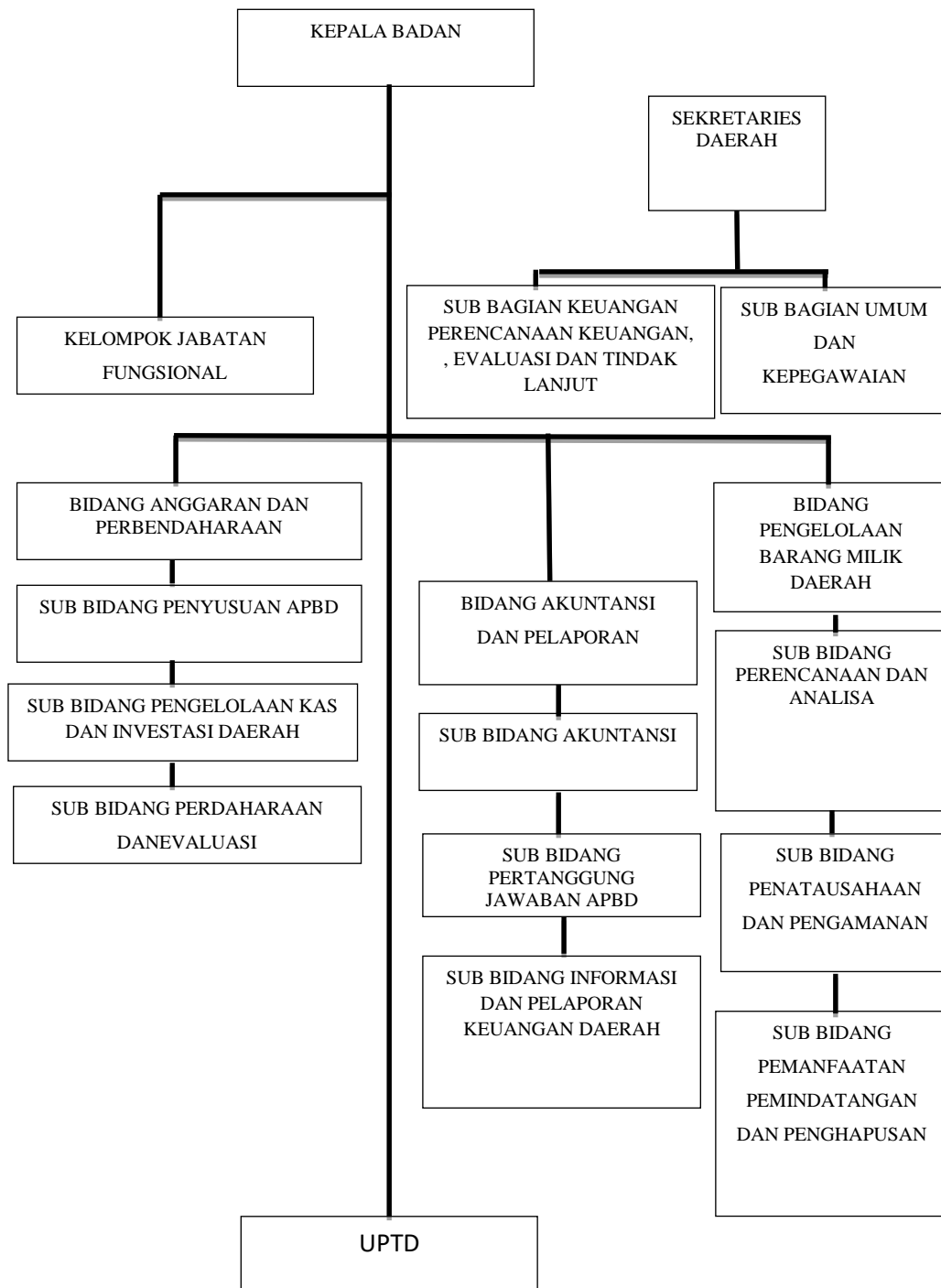
- ” Terwujudnya Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Nyiaga, dan Agro Industri yang berwawasan Agama, Budaya, dan Lingkungan yang terkemuka di Indonesia

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat pelaksana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
3. Meningkatkan Profesionalisme pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Aset Daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo terdapat susunan Organisasi yang terdiri dari:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palopo

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif Respondent

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel yaitu pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kota Palopo. Dari 76 kuesioner yang dibagikan kepada Pegawai yang Kerja di Kantor BPKAD Kota Palopo, terdapat 13 kuesioner yang cacat atau tidak kembali di karenakan pada saat di lakukan Penelitian tidak semua pegawai berada di tempat. Sebanyak 63 Orang pegawai yang bekerja di Kantor BPKAD Kota Palopo berhasil di kumpulkan sebagai Respondent dalam Penelitian ini. Demografi Respondent dapat di Klasifikasikan berdasarkan Pengembalian kuesioner, jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1	Kuesioner yang disebarakan	76
2	Kuesioner yang direspon/dikembalikan	63
3	Kuesioner yang tidak direspon	13
4	Tingkat Pengembalian	$63/76 \times 100 = 82,90\%$

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 76 kuesioener yang dibagikan terdapat 13 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 63 kuesioner yang dikembalikan. Jika dipersentasekan pengembalian kuesioner adalah 82,90%.

Tabel 4.3**Deskriptif Respondent berdasarkan jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	27	42.86%
2	Perempuan	36	57.14%
Jumlah		63	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari Tabel diatas Responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa jumlah Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 27 atau sekitar 42,86% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 36 atau sekitar 57,14%. Hal ini membuktikan bahwa pengambilan responden sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.4**Deskriptif Respondent berdasarkan Usia**

No	Usia	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	23-30	27	42.86%
2	31-40	16	25.40%
3	41-45	13	20.63%
4	46-55	7	11.11%
Jumlah		63	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang usianya 23-30 sebanyak 27 orang atau sekitar 42,86%, responden yang usianya 31-40 sebanyak 16 orang atau sekitar 25,40%, responden yang usianya 41-45 sebanyak 13 orang atau sekitar 20,63% dan responden yang usianya 46-55 sebanyak 7 orang atau

sekitar 11,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia yang produktif.

Tabel 4.5
Deskriptif Respondent berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	S1	32	50.80%
2	S2	14	22.22%
3	S3	-	0%
4	Lain-lain	17	26.98%
Jumlah		63	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari Tabel diatas tentang karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 32 orang atau sekitar 50,80%, responden yang berpendidikan terkahir S2 sebanyak 14 orang atau sekitar 22,22%, responden yang berpendidikan terakhir S3 tidak ada atau sekitar 0%, dan jumlah responden yang berpendidikan lain-lain sebanyak 17 orang atau sekitar 26,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir yakni strata satu atau S1.

Tabel 4.6
Deskriptif Statistic Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	Frekuensi					Total Sampel
	STS	TS	N	S	SS	
Kualitas Sumber Manusia (X1)	1	0	1	53	8	63
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	1	2	60	0	0	
Pengendalian Intern (X3)	1	3	59	0	0	
Pengawasan Keuangan Daerah (X4)	1	18	44	0	0	
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y)	1	0	35	27	0	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 63 responden variabel kualitas sumber daya manusia (X1) menjawab “Sangat Setuju (SS) 8 orang, yang menjawab” Setuju (S)” 53 orang, Netral (N) 1 orang, dan yang menjawab Sangat tidak setuju (STS) 1 orang. Pemanfaatan Teknologi Infomasi (X2) yang menjawab “Netral (N)” 60 orang, yang menjawab “Tidak Setuju (TS)” 2 orang, yang menjawab “Sangat Tidak Setuju (STS)” 1 orang, Pengendalian Intern (X3) yang menjawab “Netral (N)” 59 orang, yang menjawab “Tidak Setuju (TS)” 3 orang, yang menjawab “Sangat Tidak Setuju (STS)” 1 orang, Pengawasan Keuangan Daerah (X4) menjawab “Netral (N)” 44 orang, yang menjawab “Tidak Setuju (TS)” 18 orang, yang menjawab “Sangat Tidak Setuju (STS)” 1 orang, Nilai Informasi Pelaporan Keuangan (Y) menjawab “Setuju (S)” 27 orang, yang

menjawab “Netral (N)” 35 orang, yang menjawab “Sangat Tidak Setuju (STS)” 1 orang.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan tentang ringkasan data-data penelitian mean, minimum, maksimum, jumlah data (N), range, standar deviasi dan lain-lain. Hasil uji statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas SDM	63	13	49	42.42	4.79
Pemanfaatan TI	63	8	33	30.04	3.41
Pengendalian IA	63	9	34	29.76	3.44
Pengawasan KD	63	7	30	26.17	3.20
NIP Keuangan Daerah	63	11	39	34.52	3.66
Valid N (Listwise)	63				

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 yang berasal dari sebaran hasil kuesioner kepada pegawai atau staff di Kantor BPKAD Kota Palopo. Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah sampel, nilai mean, maksimum, minimum dan standar deviasi dari masing-masing perusahaan yang diteliti. Nilai minimum menjelaskan tentang nilai terendah dari suatu variabel. Nilai rata-rata menggambarkan tentang nilai kisaran

data yang diperoleh dari penjumlahan seluruh data dan membaginya dalam jumlah data, nilai maksimum menjelaskan tentang nilai tertinggi suatu variabel. Standar deviasi adalah merupakan simpangan dari nilai rata-rata yang diakar kuadratkan suatu variabel.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 13, nilai maksimum 49, nilai rata-rata (mean) 42,42 dan standar deviasinya 4,79.

Pemanfaatan Teknologi Informasi yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 33, nilai rata-rata (mean) 30,04 dan standar deviasinya 3,41.

Pengendalian Intern Akuntansi yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 9, nilai maksimum 34, nilai rata-rata (mean) 29,76 dan standar deviasinya 3,44.

Pengawasan Keuangan Daerah yang merupakan variabel independen memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 30, nilai rata-rata (mean) 26,17 dan standar deviasinya 3,20.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang merupakan variabel dependen dengan nilai minimum sebesar 4,02, nilai maksimum sebesar 4,12, nilai mean sebesar 4,07 dan standar deviasi sebesar 0,04.

Hasil statistik deskriptif pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata ukuran pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah pada nilai informasi pelaporan keuangan daerah lebih

kecil dibanding rata-rata ukuran kualitas sumber daya manusia pada variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

4.3. Uji Validitas dan Uji Realibilitas

4.3.1. Uji Validitas

Ghozali, (2013) Dengan menggunakan bantuan IBM SPSS statistic 20. Maka pengujian validitas instrumen dapat dilihat pada kolom correlation, dengan kriteria :

- 1) Jika sig (2-tailed) > 0,05 = valid
- 2) Jika sig (2-tailed) < 0,05 = tidak valid

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dilihat hasil olah data pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Hasil uji Validitas variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Pernyataan	Pearson	Sig	Ket.
Kualitas SDM1	0,617	0,000	Valid
Kualitas SDM2	0,791	0,000	Valid
Kualitas SDM3	0,696	0,000	Valid
Kualitas SDM4	0,588	0,000	Valid
Kualitas SDM5	0,559	0,000	Valid
Kualitas SDM 6	0,634	0,000	Valid
Kualitas SDM 7	0,619	0,000	Valid
Kualitas SDM 8	0,740	0,000	Valid
Kualitas SDM 9	0,661	0,000	Valid
Kualitas SDM 10	0,695	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 4.9
Hasil uji Validitas variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pernyataan	Pearson	Sig	Ket.
Pemanfaatan TI 1	0,744	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 2	0,722	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 3	0,747	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 4	0,668	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 5	0,654	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 6	0,599	0,000	Valid
Pemanfaatan TI 7	0,719	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern Akuntansi

Pernyataan	Pearson	Sig	Ket.
Pengendalian IA 1	0,615	0,000	Valid
Pengendalian IA 2	0,605	0,000	Valid
Pengendalian IA 3	0,757	0,000	Valid
Pengendalian IA 4	0,599	0,000	Valid
Pengendalian IA 5	0,753	0,000	Valid
Pengendalian IA 6	0,591	0,000	Valid
Pengendalian IA 7	0,659	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 4.11
Hasil uji Validitas variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Pernyataan	Pearson	Sig	Ket.
Pengawasan KD1	0,796	0,000	Valid
Pengawasan KD 2	0,769	0,000	Valid
Pengawasan KD 3	0,741	0,000	Valid
Pengawasan KD 4	0,709	0,000	Valid
Pengawasan KD 5	0,804	0,000	Valid

Pengawasan KD 6	0,673	0,000	Valid
-----------------	-------	-------	-------

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Tabel 4.12

Hasil uji Validitas variabel Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah

Pernyataan	Pearson	Sig	Ket.
NIP Keuangan Daerah 1	0,764	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 2	0,710	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 3	0,741	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 4	0,601	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 5	0,519	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 6	0,541	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 7	0,793	0,000	Valid
NIP Keuangan Daerah 8	0,582	0,000	Valid

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari tabel diatas maka seluruh kriteria yang digunakan valid karena korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi diatas 0,05 atau sig > 0,05 maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

4.3.2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach alpha, suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau cronbach alpha > 0,60 Ghozali (2013) dengan menggunakan bantuan software SPSS 20. maka uji reliabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabelitas

Variable	Cronbach's alpha	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,857	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,812	Reliabel
Pengendalian Intern Akuntansi	0,786	Reliabel
Pengawasan Keuangan Daerah	0,841	Reliabel
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	0,803	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari hasil tabel di atas, maka seluruh instrument dinyatakan reliabel. Dimna hasil perhitungan uji reabelitas menunjukkan cronbasch's alpha $> 0,6$ sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang handal atau dapat di percaya.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Model regresi dalam penelitian yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, diantaranya ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Adapun hasil analisisnya yakni sebagai berikut.

4.4.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji *Kolmogrov-Smirnov* (1 Sample KS) dengan melihat data residualnya apakah terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data adalah normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	1.01734390
	Absolute	.102
Most Extreme Differences	Positive	.102
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.807
Asymp. Sig. (2-tailed)		.533

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari hasil tabel diatas tentang uji *Kolmogrov-Smirnov* pada penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi residual sebesar 0,533 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolineritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai VIF	Kesimpulan
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.11	8.91	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.17	5.66	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengendalian Intern Akuntansi	0.10	9.97	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengawasan Keuangan Daerah	0.30	3.32	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Pada tabel di atas hasil analisis di atas, nilai *Tolerance* pada semua variabel independen menunjukkan hasil bahwa nilai *Tolerance* $> 0,10$. Sedangkan nilai VIF pada kedua variabel independen yang menunjukkan hasil bahwa nilai VIF < 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t hitung	Sig	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia	-2.96	> 0,05	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	9.40	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengendalian Intern Akuntansi	2.79	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengawasan Keuangan Daerah	2.49	> 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan hasil tabel dengan pengujian uji *glejser* menunjukkan bahwa semua variabel independen $> 0,05$ yang artinya semua variabel yang digunakan menunjukkan hasil tidak terdapatnya heteroskedastisitas.

4.4.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu dengan periode t dengan kesalahan $t-1$ yang berarti kondisi saat ini dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya dengan kata lain autokorelasi sering terjadi pada data time-series. Data yang baik adalah data yang tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17**Hasil Uji Autokorelasi**

Keterangan	Ket.
<i>Durbin-Watson</i>	1.963

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Pada tabel diatas nilai Probabilitas F sebesar 0,272 disebut juga sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%), sehingga berdasarkan uji hipotesis diterima artinya tidak autokorelasi.

4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk ngetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda:

Tabel 4.18**Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	3.566	1.249
Kualitas SDM	-.247	.083
1 Pemanfaatan TI	.874	.093
Pengendalian IA	.342	.122
Pengawasan KD	.190	.076

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari tabel tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,566 + -0,247X_1 + 0,874X_2 + 0,342X_3 + 0,190X_4 + e$$

Dari hasil tabel diatas, maka dapat dijelaskan koefisien regresinya sebagai berikut:

- a. Konstanta (a) sebesar 3,566, Artinya jika Kualitas Sumber Daya Manusia - 0,247 (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,874 (X_2), Pengendalian Intern Akuntansi 0,342 (X_3), Pengawasan Keuangan Daerah 0,190 (X_4) nilainya tetap atau sama dengan nol. Maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah(Y) nilai skornya sebesar 3,566.
- b. Koefisien regresi variabel Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai nilai sebesar -0,247 menunjukkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tetap maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar -0,247.
- c. Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai nilai sebesar 0,874 menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel lainnya tetap maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,874.
- d. Koefisien regresi variabel Pengendalian Intern Akuntansi mempunyai nilai sebesar 0,342 menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Intern Akuntansi mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tetap maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,342.

- e. Koefisien regresi variabel Pengawasan Keuangan Daerah mempunyai nilai sebesar 0,190 menunjukkan bahwa variabel Pengawasan Keuangan Daerah mengalami kenaikan sebesar satu satuan dan dengan asumsi variabel-variabel independen lainnya tetap maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,190.

4.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien Determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

Tabel 4.19

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.961 ^a	.923	.918		1.05184	1.963

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,918 artinya 91,8% variabel dependen Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah dijelaskan oleh variabel independen Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah dan sisanya 8.2% (100% - 91,8%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan seperti yang diuraikan pada landasan toeritis sesuai ukuran yang digunakan dalam penelitian.

4.5.2 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk menentukan apakah variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial.

Tabel 4.20
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.566	1.249		2.856	.006
1 Kualitas SDM	-.247	.083	-.323	-2.966	.004
Pemanfaatan TI	.874	.093	.816	9.403	.000
Pengendalian IA	.342	.122	.322	2.798	.007
Pengawasan KD	.190	.076	.166	2.498	.015

a. Dependent Variable: NIP Keuangan Daerah

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Dari hasil tabel diatas, maka adapun penjelasannya dapat diketahui dengan menunjukkan hasil uji t sebagai berikut :

a. Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)

Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,004 < 0,05$). Hal ini berarti Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 1 ditolak.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi(X_2)

Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 2 diterima.

c. Pengendalian Intern Akuntansi(X_3)

Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,007 < 0,05$). Hal ini berarti Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 3 diterima.

d. Pengawasan Keuangan Daerah (X_4)

Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,015 < 0,05$). Hal ini berarti Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah, sehingga ini mengakibatkan hipotesis 4 diterima.

4.5.3 Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah secara bersama-sama.

Tabel 4.21
Hasil Pengujian Simultan (uji f)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	767.545	4	191.886	173.438	.000 ^b
Residual	64.169	58	1.106		
Total	831.714	62			

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikan F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas < 0,05 maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_2), Pengendalian Intern Akuntansi (X_3) dan Pengawasan Keuangan Daerah (X_4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga jika Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara bersama-sama meningkat, maka Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1 variabel independen kualitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap variabel dependen nilai informasi

pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin rendah nilai kualitas sumber daya manusia, maka akan semakin menurun nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika kualitas sumber daya manusia dihasilkan dengan baik dan terampil sesuai dengan kinerja individu maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri (2016), Wirmi Eka Putra (2017), Harlinda (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.

4.6.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 2 variabel independen pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pemanfaatan teknologi informasi, maka akan semakin meningkat nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan baik dan terampil sesuai dengan prosedur yang ada maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri (2016),

Harlinda (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

4.6.3 Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi (X₃) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 3 variabel independen pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pengendalian intern akuntansi, maka akan semakin meningkat nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika pengendalian intern akuntansi dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Ahmad Jufri (2016), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), Wirni Eka Putra (2017), dan Harlinda (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

4.6.4 Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah (X₄) terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Y).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 4 variabel independen pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap variabel dependen nilai informasi pelaporan keuangan daerah. Hal ini berarti semakin tinggi nilai pengawasan

keuangan daerah, maka akan semakin meningkat nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketika pengawasan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada maka nilai informasi pelaporan keuangan daerah akan senantiasa menghasilkan informasi pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai harapan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Mansur, Eko Prasetyo dan Reyka Maiyarni (2017), Patras Thebora, Jenny Morasa dan Sintje Rondonuwu (2017), yang memperoleh hasil penelitian bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengujian secara simultan (uji F), menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah.
2. Hasil uji parsial (uji t), menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,5$). Hal ini berarti semua variabel independen berpengaruh terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah sebagai variabel dependen.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kantor BPKAD Kota Palopo harus senantiasa mempertahankan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah yang baik karena hal ini

menjadi perhatian keunggulan dan tindakan yang positif demi mempertahankan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah yang baik dan benar serta menjadikan instansi tersebut dapat dipercaya dari pihak dalam maupun pihak luar yang berkepentingan.

2. Kantor BPKAD Kota Palopo harus selalu meningkatkan Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah agar senantiasa terjaga kepercayaan dari pihak dalam maupun pihak luar instansi serta sekaligus tanggung jawab instansi untuk senantiasa bersikap akuntabel dan transparan.
3. Bagi para penulis selanjutnya agar kiranya melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi tentang kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan daerah, semoga penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu tempat untuk mendapatkan informasi tentang nilai informasi pelaporan keuangan daerah, guna untuk melakukan penelitian-penelitian yang kebaruan selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Coryanata, I. (2016). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transfaransi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(2), 110–125. [Http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai/Article/View/678](http://Journal.Umy.Ac.Id/Index.Php/Ai/Article/View/678)
- Chandra Satria. (2020). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Secara Parsial Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Kabupaten/Kota Di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Ekonomica Sharia*, 5, 61–90.
- Delima, R. P. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JURNAL EKONOMI*, 23(September), 3754.
- Febry Perdana Kusuma, I Nyoman Mahaendra Yasa, I. K. D. (2016). Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(12), 4115–4150.
- Gumanti, T. A. (2009). Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, September, 1–29.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multi variate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 7. Semarang :Universitas Diponegoro.
- Hadilia, N. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate. *Kawasa*, IX(2).
- Harifan, Handariko. 2009. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Herlinda. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Kualitas Nformasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Emperis Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Provensi Riau) *Jurnal Sorot*, 11(2) 127-144
- Komang Sartika Dewi, Wayan Cipta, I. W. B. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 34.
- Lilis Setyowati, Wikan Isthika, R. D. P. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Kinerja*, 20(2), 179. <https://doi.org/10.24002/Kinerja.V20i2.843>
- Loli Efendi, Darwanis, S. A. (2017). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas

- Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 182–195. <https://doi.org/10.24815/jped.V3i2.8230>
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Peretakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajeme YKPN.
- Mardiasmo. 2006, Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 :1.
- Megayanti, P., Adiputra, I. M. P., & Sinarwati, N. K. (2015). (*STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA*) *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 3(1).
- Mansur, M. Et., Al. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Of Applied Accounting And Taxation*2 (2), 143-152.
- Putra, W. E. (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. 10(2), 282-293.
- Riang Agustin,Dwi Cahyono, G. A. (2020). Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan. *Internatioanal Journal Of Social Science And Business*, 4(1), 116. <https://doi.org/10.23887/Ijssb.V4i1.24068>
- Rini, N. W. L. D. Dan I. G. A. Intan Saputri. (2018). Pengaruh Pengawasan Keuangan,Sumber Daya Manusia,Teknologi Informasi,Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *Krisna*, 10(1), 63–69.
- Rosnidah, I. (2011). Analisis Dampak Motivasi Dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon). *Pekbis Jurnal*, 3(2), 456–466.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <https://doi.org/10.9744/Jak.2.2.Pp.138-150>
- Sari. G. I. Dan Fadli (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*. 7(3). 17-34
- Srimindarti, C. (2008). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Fokus Ekonomi*, 7(1), 14–21.
- Susanto, D. (2010). *Strategi Peningkatan Kapasitas Modal Sosial Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Pendamping Pengembangan Masyarakat*. 8(1). <https://doi.org/10.29244/Jurnalkmp.8.1.%P>
- Sonia, D. Puspita. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia,Pemanfaatan Teknologi Informasi,Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informsi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, 3(1), 2104–2118.

Thebero. P. Et., Al. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informaselaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada BPK-AD Kantor Walikota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 12(2). 575-593

Theresia F. Sitanala." Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangandaerah maluku". *jurnal soso2*,vol. 4, no. 2, 2015

Upabayu, I. P., Mahaputra, R., & Putra, I. W. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 139–149. <https://doi.org/10.15294/Jda.V7i2.4124>

Windyaningrum, 2010. Pengaruh SDM Pemanfaatan TI Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi. *Jurnal SNA*. STIE ST. Surakarta:Pignatelli.

Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.